

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri atas perairan laut teritorial, perairan laut nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Garis pantai terpanjang mencapai 81.000 km dengan gugusan pulau sebanyak 17.508 buah menjadikan Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan biota laut, sumber daya ini jika dimanfaatkan dengan maksimal dapat menopang pembangunan nasional. Pembangunan sektor perikanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, dapat diwujudkan dengan mendorong pertumbuhan agro industri melalui penyediaan bahan baku, membuka lapangan pekerjaan baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi (Purwanti, 2010:10)

Potensi kelautan yang begitu melimpah belum mampu dikelola dengan baik untuk memberi kontribusi bagi pembangunan nasional, hal ini dikarenakan sektor perikanan tangkap masih dikuasai oleh nelayan kecil dan tradisional. Nelayan tradisional umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga tingkat teknologi, inovasi, dan informasi yang dimiliki juga masih tergolong rendah yang pada akhirnya menyebabkan produktivitas nelayan juga rendah. Sebanyak 94,44% dari usaha perikanan tangkap masih menggunakan perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal dengan mesin dalam sampai 5GT yang hanya mampu beroperasi pada perairan pantai dan tidak dapat memanfaatkan sumber daya ikan

di laut lepas (*high seas*) (Purwanti, 2010:2).

Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia dihadapkan pada kondisi yang berseberangan. Di beberapa daerah pantai potensial telah dimanfaatkan dengan intensif bahkan mengalami kondisi *over fishing*, sementara di daerah lain yang juga potensial belum tersentuh pembangunan sama sekali. Adanya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang rencana jangka panjang. Undang-undang tersebut mempunyai misi menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat serta berbasiskan kepentingan nasional salah satunya dengan membangun ekonomi kelautan terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (KKP, 2011:5).

Menurut Mulyadi (2005:5) dalam jangka panjang pembangunan wilayah kelautan secara umum meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha, pengembangan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan dan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya wilayah kelautan, peningkatan kemampuan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dan peningkatan pendidikan, pelatihan, riset dan pengembangan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dilakukan secara optimal maka akan menghasilkan kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh sehingga akan menciptakan perekonomian yang sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat (Darojat 2012 dalam Adiba 2013:2).

Di Indonesia kemiskinan masih sangat lekat dengan masyarakatnya, menurut data BPS pada tahun 2009 tercatat penduduk miskin mencapai 32,53 juta jiwa dan sebanyak 24,07% dari jumlah tersebut berasal dari profesi nelayan. Menurut Nikijluw (1989) dalam Zasuli (2009:9) nelayan merupakan kelompok masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (*the poorest of the poor*). Tingkat kehidupan mereka setaraf dengan kelompok petani kecil, bahkan jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain disektor pertanian, nelayan khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional dapat digolongkan dalam lapisan sosial yang paling miskin dan sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berasal dari pedesan dan pesisir.

Pembangunan perikanan pada hakikatnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak sumber daya itu sendiri. Maka implementasi pemanfaatan sumber daya akan terus diarahkan pada pencapaian produktifitas optimal dengan pemanfaatan secara rasional. Produksi sektor perikanan tangkap mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,15% yakni 4.276.720 ton pada tahun 2001 menjadi 4.728.320 ton pada tahun 2003. Volume ekspor pada tahun 2001 sebesar 487.117 ton dengan nilai mencapai 1.631.899.000 US\$ mengalami peningkatan pada tahun 2003 menjadi 696.260 ton dengan nilai mencapai 2.004.067.000 US\$. Kenaikan volume produksi ini tidak diringi dengan kenaikan kesejahteraan nelayan yang hidup didaerah pesisir (Barani dalam Purwanti, 2010:1).

Salah satu ciri terpenting dari produksi perikanan laut adalah berlangsung secara musiman (*seasonal production*). Produksi musiman mengalami perubahan

yang disebabkan oleh cuaca dan iklim. Perbedaan iklim mencerminkan perbedaan pada musim, pertumbuhan ikan dan banyaknya jenis ikan (Hanafiah dan Saefudin, 1983:3). Ketergantungan hidup nelayan kepada musim sangat tinggi hal ini disebabkan karena tidak setiap saat nelayan dapat melaut terutama pada musim ombak yang dapat terjadi selama musim tertentu dalam kurun waktu yang relatif lama yang berakibat pada berkurangnya pendapatan yang diperoleh nelayan. Musim ikan juga tidak terjadi sepanjang tahun, pada saat musim paceklik tiba akumulasi pendapatan yang diperoleh nelayan selama musim ikan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga nelayan. Kondisi ini juga dapat diidentifikasi dari tingkat pendidikan anak-anak nelayan dan pola konsumsi sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh rendah maka menjadi logis apabila tingkat pendidikan anak nelayan juga menjadi rendah karena harus berhenti sekolah bahkan sebelum lulus dari pendidikan dasar. Selain itu kebutuhan hidup yang paling mendasar bagi rumah tangga nelayan adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan kelayakan perumahan (Kusnadi, 2006:42).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu objek utama dari kajian ilmu ekonomi yang berusaha mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada Negara berkembang. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Menurut Jinghan (1993:6-9 dalam Rama dan Makhilani 2013:32-33) pembangunan ekonomi dapat diindikasikan dengan tiga cara yakni: *pertama*, perkembangan ekonomi tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional dalam jangka panjang. *Kedua*, perkembangan ekonomi juga dikaitkan dengan

pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang. *Ketiga*, perkembangan ekonomi dapat dilihat tingkat kesejahteraan ekonomi yang berarti perkembangan ekonomi merupakan suatu proses dimana kenaikan pendapatan nasional nyata per kapita diiringi dengan turunnya kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga indikator tersebut menuai banyak kritik karena tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Sementara itu dalam beberapa literatur, pembangunan ekonomi diukur dengan meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan kenaikan dari perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk. hal ini menjadi proses yang dinamis dan structural yang dapat menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan (Rama dan Makhlani, 2013:34-35)

Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia berperan membimbing dan mengarahkan manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak. Islam sangat memperhatikan pembangunan dalam bidang ekonomi dan menempatkan manusia sebagai subyek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Khurshid (1976:178 dalam Rama dan Makhlani, 2013:35) meletakkan empat dasar dalam pembangunan ekonomi yang diturunkan dalam ajaran islam yakni: *tauhid*, pengaturan tentang dasar-dasar hubungan Allah SWT dengan manusia dan hubungan sesama manusia. *Rubbubiyah*, dasar hukum yang ditetapkan Allah SWT yang selanjutnya digunakan sebagai model pembangunan ekonomi yang bernafaskan nilai islam. *Khalifah*, manusia sebagai khalifah bertanggung jawab atas amanah Allah SWT dalam segala aspek kehidupan. *Tazkiyyah*, mengajarkan manusia membangun semua dimensi yang ada didalam dirinya termasuk dimensi

ekonomi yang berujung pada *falah* yakni kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat.

Konsep pembangunan ekonomi dalam islam tidak hanya memandang aspek materi semata, tetapi juga menekankan pada aspek moral dan spiritual. Pembangunan harus menitikberatkan pada pengembangan manusia di semua aspek kehidupan karena kepuasan manusia tidak hanya terletak pada kebutuhan ekonomi saja melainkan juga dari kebutuhan spiritual dan non materi lainnya. Konsep pembangunan ekonomi berangkat dari pembangunan sumber daya manusia yang merangkum seluruh potensi, kemampuan dan kualitas manusia dari sudut pandang materi, moral dan spiritual (Chapra, 2000:5).

Sumber daya manusia (SDM) atau dalam kajian syariah disebut sumber daya insani merupakan subyek dan sekaligus obyek utama dari pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak mulai dalam kandungan hingga akhir hidup manusia. Manusia (*al-insan*) dalam membangun sumberdaya insani tidak lepas dari tujuan bermuamalah di dunia untuk mencapai *falah* (kesejahteraan). Pencapaian *falah* ini sangat bergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Umumnya, manusia mengalami kesulitan dalam menyelaraskan berbagai tujuan hidup karena keterbatasan yang ada dalam diri manusia dan kurangnya kesadaran akan hakikat keberadaan manusia didunia, mengapa kita tercipta di dunia. Tujuan Allah SWT menciptakan manusia yang paling utama adalah beribadah kepada Allah SWT, dalam hal ini segala aktifitas yang dilakukan manusia haruslah diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dzariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Wamâ khalaqtul jinna wal insa illa liya'budûn

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Ad-Dzariyaat : 56)

Mengabdikan dalam ayat ini berarti menghambakan diri kepada Allah SWT dengan beribadah kepada-Nya. Sayyid Quthub dalam Shihab (2009:108) menjelaskan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ritual. Sebagai khalifah di bumi manusia dituntut oleh aneka ragam aktifitas penting guna memakmurkan bumi, mengenal potensi yang terkandung didalamnya, sambil mewujudkan apa yang dikehendaki Allah SWT dalam penggunaan, pengembangan dan peningkatannya. Tugas khalifah termasuk dalam makna ibadah yang mencakup dua hal pokok, yakni: pertama, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah SWT dalam hati setiap insan. Kemantapan hati bahwa ada hamba yang patuh dan Tuhan yang disembah tidak ada selainnya. Kedua, segala bentuk aktifitas mengarah kepada Allah SWT secara tulus, melepaskan diri dari segala perasaan yang lain dan dari segala makna selain makna penghambaan diri kepada Allah SWT, sehingga segala aktifitas bagaikan ibadah ritual, dan setiap ibadah ritual serupa dengan memakmurkan bumi.

Bentuk upaya memakmurkan bumi dengan bekerja keras memanfaatkan dan mengolah apa yang ada di bumi dengan arif. Bekerja merupakan kewajiban setiap manusia guna memenuhi kewajibannya. Allah SWT sungguh sangat mencintai hambaNya yang bekerja keras untuk penghidupannya. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bekerja sejak dini yakni dengan menggembala kambing. Kesejahteraan hidup ditentukan dengan seberapa keras kita bekerja untuk mendapatkan imbalan dari keringat kita sendiri karena Allah SWT akan membalas setiap apa yang kita usahakan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Anfal ayat 53:

بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Biannallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amahâ 'alâ qaumin hattâ yughayyiru mâ bianfusihim, wa annallaha sami'un 'alim.

Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri], dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. Al-Anfal:53)

Kemakmuran yang selanjutnya disebut sebagai kesejahteraan tidak merujuk pada suatu kondisi yang yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah bergantung pada ukuran yang digunakan oleh para ahli. Setiap orang memiliki nilai sejahteranya sendiri-sendiri tidak hanya bergantung pada aspek materi yang dimilikinya. Seseorang yang hidupnya sederhana, bebas dari masalah dapat dikatakan lebih sejahtera daripada seseorang yang hidup mewah namun mempunyai banyak masalah.

Kesejahteraan dalam syariah islam tidak melulu tentang terpenuhinya segala bentuk kebutuhan materi, tetapi juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang. Islam tidak mengakui pemisahan antara keduanya, karena tujuan syariah adalah terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik selama hidup di dunia maupun ketika berada di akhirat kelak (Farwah, 2013:2).

Falah diartikan sebagai kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun diakhirat yang hanya dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan manusia secara seimbang. Keseimbangan ini apabila diterapkan dalam masyarakat akan memberikan dampak berupa masalah. Menurut as-Syatibi dalam LP3EI (2012:5-6), masalah yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia terdiri atas

pemenuhan lima dasar tujuan, yakni agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'Aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*). Kelima dimensi ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apabila salah satu dari kelima dimensi ini tidak terpenuhi maka kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan sempurna.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali yang letaknya paling barat dan memiliki luas laut kurang lebih 604,24 Km². Wilayahnya terdiri atas 5 kabupaten, 42 desa, 9 kelurahan dimana 24 desa diantaranya merupakan desa pesisir yang menjadikan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, petani ikan, pedagang dan pengolah hasil laut. Potensi lestari sumber daya perikanan laut di perairan bali barat mencapai 56.947 ton pada tahun 2012. Komoditas hasil tangkapan bervariasi dan di dominasi oleh lemuru, tongkol dan layang. Hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada table 1.1. dimana pada tahun 2004 banyaknya hasil tangkap sebesar 13.998.100 kg dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2007 menjadi 27.760.400 kg, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 26.453.800 kg.

Table 1.1
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Jembrana tahun 2004-2008

Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Poduksi (Rp. 000)
2004	13998100	26054970
2005	14247150	37095748
2006	17631900	35450483
2007	27760400	42956150
2008	26453800	63818680

Sumber: BPS Kab. Jembrana (2009). Jembrana dalam angka

Ada beberapa hal yang menyebabkan berfluktuasinya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan antara lain karena keadaan iklim, bencana alam, biaya tetap yang dikeluarkan untuk investasi awal dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk operasional kapal tangkap dan tersedianya tenaga kerja baik di darat maupun dilaut, tersedianya pasar dan prasarana penangkapan ikan misalnya jarring, kapal, dan mesin, tersedianya infrastruktur seperti jalan, dermaga dan TPI (tempat pelelangan ikan) (Hanafiah dan Saefudin, 2083:5)

Tabel 1.2
Jumlah Produksi Ikan menurut Kabupaten/Kota Di Bali Tahun 2009
(dalam ton)

No	Kabupaten	Perikanan laut		Jumlah
		Tangkap	Budidaya	
1	Jembrana	45.279,00	0,1	45.279,10
2	Tabanan	566,40		566,40
3	Badung	2.549,90	28393,5	30.943,40
4	Gianyar	480,80		480,80
5	Klungkung	2.264,70	103234,5	105.499,20
6	Bangli			0,00
7	Karangasem	14.495,00		14.495,00
8	Buleleng	11.963,70	1438,1	13.401,80
9	Denpasar	24.326,30	2933,7	27.260,00
	Jumlah	101.925,80	135.999,90	237.925,70

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009. Bali dalam Angka.

Kabupaten Jembrana memiliki potensi perikanan dan kelautan terbesar di pulau bali, hal ini terlihat dari tingginya tingkat produksi tangkapan ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) pengambangan. Hingga tahun 2013 sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar di kabupaten jembrana. Selain itu kabupaten jembrana, terutama daerah pesisir mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti, dimana seperti yang banyak kita ketahui masyarakat pesisir cenderung konsumtif pada saat musim panen tiba dan terjerat hutang kepada

rentenir pada musim paceklik, sehingga nelayan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan jauh dari konsep sejahtera.

Melihat alasan pengukuran kesejahteraan nelayan selama ini masih bersifat konvensional, maka studi ini akan menganalisis tingkat kesejahteraan nelayan melalui pendekatan syariah. Atas dasar inilah studi ini mengangkat judul tesis sebagai berikut: Implementasi profesi nelayan muslim dalam mewujudkan kesejahteraan perspektif maqashid syariah (studi kasus nelayan muslim di kabupaten Jembrana Bali)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana implementasi profesi nelayan muslim dalam mewujudkan kesejahteraan perspektif maqashid syariah?*

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya disusun tujuan studi adalah unruk mengetahui implementasi profesi nelayan muslim dalam mewujudkan kesejahteraan perspektif maqashid syariah pada studi kasus nelayan muslim di kabupaten Jembrana Bali.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat-manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti sendiri diharapkan akan mengetahui kesejahteraan nelayan muslim di kabupaten Jembrana.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi kebijakan dan menyusun perencanaan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan nelayan.

3. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan menerapkan teori-teori yang berkenaan dengan al-Quran dalam penulisan ini.
4. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi dari tesis ini.

